

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19

Asnani^a dan Munawar Shodiq^b

^a Universitas Lampung

^b Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

e-mail : a asnani@fisip.unila.ac.id, b munawar.shodiq1@gmail.com

Abstrak

Kampung KB diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi strategis yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mengimplementasikan berbagai program Bangga Kencana di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu aspek keberhasilan dari program Kampung KB. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis situasi pelaksanaan Kampung KB dan melakukan analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik telah terinternalisasi dengan baik, partisipasi masyarakat sangat baik dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan keterbatasan pada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Berdasarkan tahapan partisipasi public Arnstein maka partisipasi masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam mengelola Kampung KB berada pada level 6 yaitu partnership (bekerjasama).

Kata Kunci: partisipasi masyarakat; kampung keluarga berkualitas; pandemi covid-19

Abstract

Kampung KB is expected to be able to bring up various strategic innovations that have high leverage in implementing various Proud Kencana programs in the field. Active community participation is one aspect of the success of the Kampung KB program. The purpose of this study was to analyze the situation of the implementation of the KB Village and analyze the forms of community participation in the management of the KB Village before and during the Covid-19 pandemic. The research method used is a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that the Kampung KB institution in Way Lunik Village has been well internalized, community participation is very good by volunteering to pioneer and be involved in KB Village activities to date. However, obstacles in carrying out activities during the current Covid-19 pandemic have caused limitations in the implementation of activities. Coordination and socialization activities are carried out by utilizing social media. Based on the stages of Arnstein's public participation, the participation of the Way Lunik Village community in managing the KB Village is at level 6, namely partnership (cooperating).

Keywords: Community participation; Kampung KB; covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Kebijakan pengendalian jumlah penduduk terus menjadi sorotan karena menyangkut taraf kesejahteraan masyarakat. Menurut WHO bahwa pada negara yang belum berkembang jumlah penduduk diprediksi akan meningkat dua kali lipat, dari 898 juta jiwa penduduk dunia tahun 2017 menjadi 1,8 milyar jiwa pada tahun 2050, data ini akan terus meningkat pada tahun 2100 jumlah penduduk akan meningkat menjadi 2,9 milyar jiwa (WHO, 2018). Tak terkecuali Indonesia terus mencari strategi dan formula yang tepat untuk mengendalikan jumlah penduduk. Berdasarkan data sensus penduduk Provinsi Lampung tahun 2020, sebanyak 9.007.848 jiwa yang terdiri atas 4.616.805 jiwa penduduk laki-laki dan 4.391.043 jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang paling besar jumlah penduduk dan Kota Bandar Lampung menjadi urutan ke-2 dengan jumlah penduduk terbesar diantara wilayah kabupaten / kota di Provinsi Lampung, dan menjadi wilayah perkotaan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen (BPS, 2020). Kompas.com menjabarkan bahwa jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran meningkat hingga kriminalitas meningkat. Oleh sebab itu pembangunan masyarakat menjadi tujuan utama agar tercapainya kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar program Bangsa Kencana. Program Bangsa Kencana tidak terbatas pada pengendalian jumlah penduduk

saja melainkan menyiapkan generasi muda berencana, pelayanan KB, bahkan untuk menekan bonus demografi, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak dengan tolok ukur menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagai salah satu upaya penguatan program Bangsa Kencana sampai ketingkatan daerah terkecil yaitu desa, maka Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran dan dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN dapat membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana) di seluruh Kabupaten dan Kota.

Sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di Kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh

masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

Pembentukan Kampung KB merujuk pada Surat Edaran Mendagri No.440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana seluruh Indonesia; Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016, Perihal Siaran Langsung Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia. Sedangkan bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar dalam pembentukan Kampung KB di Provinsi Lampung adalah dalam bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6/08/B.VI/HK/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kampung KB.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu aspek keberhasilan dari program kampung KB (Resnawaty et al., 2021). Sebagaimana tertulis dalam buku kampung KB bahwa terdapat lima indikator keberhasilan kampung KB, yaitu: (1) Komitmen kuat dari pemangku kebijakan dari semua tingkatan (2) Integritas lintas sektor (3) Optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja, (4) Semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, (5) Partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam percepatan program Bangga Kencana disebut dengan istilah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (BKKBN,

2019). Secara umum pengembangan IMP bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta institusi masyarakat agar menjadi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana yang dinamis dan mandiri (Dewi et al., 2021). Hal ini senada dengan (Munawar & Renggina, 2021) bahwa Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB memiliki pengaruh dari pemahaman yang mereka terima dari kegiatan-kegiatan pembinaan dari penyuluh KB.

Upaya ini seolah-olah tertahan dan mendapat tantangan berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harapan besar dari berbagai bentuk kegiatan dan program dalam Kampung KB menjadi sulit terwujud seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Keadaan ini telah memaksa berubahnya pola kerja pengelola Kampung KB, Penyuluh KB dan bahkan seluruh stakeholders lintas sektorpun berubah. Namun dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pengelolaan Kampung KB. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan dan sangat berpengaruh terhadap kinerja program dan berdampak bagi proses pembangunan keluarga pada masyarakat Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan melihat pelaksanaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik selama Pandemi Covid-19 serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB selama Pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 2019).

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu Kampung KB Percontohan di Provinsi Lampung. Objek Penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Way Lunik yang terlibat dalam kepengurusan Kampung KB. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan observasi. Pada tahapan pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi NVIVO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program Bangga Kencana tahun 2020-2024, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat ditingkat terkecil.

Tahun ini, pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana, yaitu pertama, menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) menjadi 2,24 per-WUS dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun menjadi 24 kelahiran per 1.000 WUS usia 15-19 tahun. Target kedua, meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) menjadi sebesar 62,16%. Target ketiga, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,3%. Target Bangga Kencana keempat

adalah meningkatkan median usia kawin pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55 (Media Indonesia).

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program Bangga Kencana dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Apabila seluruh desa maju akan menciptakan Negara yang maju. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kampung KB (BKKBN, 2017) terdapat tiga hakikat Kampung KB yaitu:

- 1) Kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB;
- 2) Pembinaan kelangsungan ber-KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran;
- 3) Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan

Unsur pengelola Kampung KB Kelurahan Way Lunik terdiri dari Penyuluh KB (PKB dan PLKB), PPKBD, Sub-PPKBD dan Mitra Kerja. Pengelola Kampung KB yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah PPKBD, Sub-PPKBD dan kader. Unsur pengelola Kampung KB di Kelurahan Way Lunik sudah menjalankan perannya masing-masing terlihat pada

pelaksanaan kegiatan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pelayanan Program Keluarga Berencana yang selama ini dijalankan oleh BKKBN. Pelayanan terhadap masyarakat mengalami hambatan sehingga diperkirakan akan terjadinya kehamilan dan kelahiran yang tidak diinginkan meningkat.

Pelayanan KB yang dilaksanakan selama ini melalui berbagai kegiatan sosialisasi Penyuluh KB, Baksos dan juga melalui kader-kader kesehatan yang ada di tingkat kelurahan dan desa. Pelayanan yang diberikan bersifat person to person mengalami kendala akses saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kebijakan physical distancing atau social distancing harus diterapkan untuk melawan penyebaran virus. Oleh sebab itu menurunkan kegiatan aktivitas Kampung KB dan partisipasi masyarakat juga terbatas dalam pengelolaan Kampung KB. Sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Perbedaan pelaksanaan kegiatan sebelum pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19

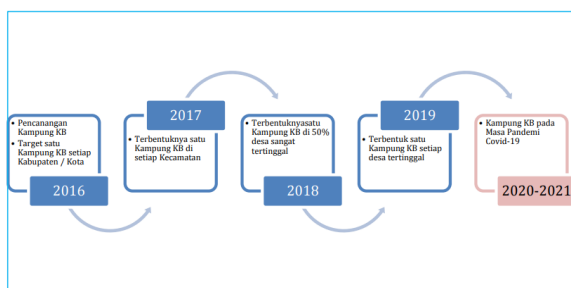
Sebelum Covid-19	Saat Covid-19
Banyak melakukan aktivitas seperti sosialisasi, penyuluhan, pendataan, pelayanan dan berbagai persiapan perlombaan kelurahan	Kegiatan Kampung KB saat pandemi sangat terbatas dan harus menalankan protokol kesehatan
Pelaksanaan posyandu dilakukan di 3 tempat Cahaya Kartini 1, Cahaya Kartini 2 dan Cahaya Kartini 3 rutin setiap bulan.	Pelaksanaan posyandu dilakukan di 3 tempat Cahaya Kartini 1, Cahaya Kartini 2 dan Cahaya Kartini 3 rutin setiap bulan.
Pelaksanaan posyandu dilakukan di 3 tempat Cahaya Kartini 1, Cahaya Kartini 2 dan Cahaya	Lebih banyak menggunakan online, pengurus Kampung KB diutamakan yang

Kartini 3 rutin setiap bulan.	mengusai komputer atau media sosial
Pembinaan dari PLKB dilakukan rutin setiap bulan dan dihadiri oleh seluruh Sub PPKB.	Baru beberapa kali (2 kali pertemuan) dan orang tertentu saja untuk hadir karena terbatas. Dan menjalankan protokol kesehatan
Banyak melakukan kegiatan pendataan, sosialisasi, penyuluhan dan perlombaan.	Tidak ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan lomba kelurahan, namun hanya melakukan pendataan saja. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah saat zona merah.
Rapat dilakukan secara tatap muka di aula kelurahan dengan peserta yang hadir lebih banyak	Rapat darurat hanya orang tertentu dan terbatas, selanjutnya lebih banyak komunikasi dan koordinasi menggunakan WA Grup yaitu Grup Kader Way Lunik yang terdiri dari Sub PPKB, BKB, BKR, BKL dan Posyandu. Kendalanya tidak semua aktif merespon di dalam grup tersebut. Jika ada himbauan disampaikan dalam WA Grup tersebut.
Aktivitas PAUD berjalan normal	Semenjak pandemi Covid-19 aktivitas PAUD diliburkan, saat ini sejak Juli 2021 mulai dirintis dibuka kembali dengan beberapa siswa saja pada sore hari. Siswa PAUD saat ini sangat sedikit sekali karena antusias warga untuk mendaftarkan anaknya sekolah sangat rendah
Kerjasama lintas sektor dari berbagai instansi Dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lain-lain	Berkurangnya kerjasama lintas sektor sehingga kegiatan Kampung KB menjadi berkurang

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Gambar 7 Road Map Kampung KB



Sumber: <https://kampungkb.gkkbn.go.id/>

Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis". Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kampung KB (BKKBN, 2017) Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program Bangga Kencana guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan 8 (delapan) fungsi

keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB Way Lunik diantaranya:

1) Pokja Kampung KB

Terlibat dalam kepengurusan Kampung KB dan berusaha aktif berdasarkan tugas yang diberikan. Semangat berorganisasi sudah ada dari internal masyarakat, terbukti beberapa pengurus Kampung KB adalah kelompok posyandu sejak tahun 1990an jauh sebelum ada Kampung KB. Namun semangat ini perlu ditularkan kepada pengurus yang lain terutama kaum muda sebagai bentuk regenerasi sehingga Kampung KB dapat terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

- 2) Aktif dalam rapat, sosialisasi, melaksanakan kegiatan sebagai panitia kegiatan dan penyuluhan bagi pengurus.
- 3) Selain pengurus, warga juga aktif memberikan data yang dibutuhkan oleh kader.
- 4) Hadir dalam kegiatan posyandu baik balita maupun lansia.
- 5) Kader memberikan pelayanan kesehatan kepada warga (pemberian vitamin dan lain-lain)
- 6) Kegiatan BKR sudah mulai berjalan yang digerakkan oleh beberapa remaja misalnya giat dalam kegiatan ulang tahun kemerekaan Indonesia pada 17 Agustus 2021. Sosialisasi kepada remaja sangat penting terutama tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan di usia muda.
- 7) Kegiatan lintas sektor Penyelenggaraan kegiatan dalam

Kampung KB di Kelurahan Way Lunik melibatkan berbagai sektor dan berbagai jenis kegiatan yang menunjang kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Salah satunya peningkatan keterampilan misalnya kerajinan tapis. Kegiatan ini dilakukan saat setelah pulang dari PAUD, tapi lama-kelamaan berhenti karena tidak ada ruang khusus untuk kegiatan tersebut.

Wadah Kampung KB ini dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berpikir (mindset) masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKA yang ada.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan pelayanan KB bergerak dengan cara mengunjungi pasangan usia subur kemudian mengedukasi untuk memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Namun demikian cara ini juga mengalami kendala yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat perkotaan dengan kader kesehatan. Petugas/ kader kesehatan yang datang ke rumah-rumah dicurigai sebagai peminta-minta atau pengemis. Petugas kader kesehatan menyampaikan identitas dan maksud dan tujuannya terlebih dahulu, setelah itu baru diterima dan memberikan keterangan data yang diminta.

Aturan Pelayanan KB saat Pandemi Covid-19:

- 1) Pada saat pelayanan bidan/dokter memakai APD dan masker

- 2) Pelayanan MOW, MOP agar dapat ditunda (sementara dapat menggunakan metode kontrasepsi yang lain)
- 3) Saat pelayanan menerapkan physical distancing termasuk saat menyerahkan pil atau kondom kepada pasien
- 4) Pasien harus menggunakan masker
- 5) Pasien membuat perjanjian sebelum mendatangi tempat praktek bidan atau dokter
- 6) Jika melakukan tindakan penyuntikan KB, sebaiknya pasien tengkurap dan menghadap arah berlawanan dari posisi bidan/dokter

Partisipasi masyarakat dalam Kampung KB yang masih sangat rendah dilihat dari kesetaraan gender dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik sebagai pengurus maupun sebagai warga yang terlibat (penerima manfaat). Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah pengarusutamaan gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender (Renstra BKKBN 2020- 2024) (BKKBN, 2020).

Strategi kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan Kampung KB ditingkat Kelurahan Way Lunik untuk

mendukung penguatan kelembagaan program Bangga Kencana di Tingkat Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. 2) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga Kencana lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB. Sinkronisasi kegiatan lintas sektor dapat meningkatkan manfaat Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran (segmentasi sasaran wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (segmentasi kebutuhan masyarakat). Termasuk prinsip kesetaraan gender pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lintas sektor. 3) Melakukan integrasi program pembangunan ditingkat kelurahan melalui penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga Kencana dengan program pembangunan lainnya, antara lain koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/ PKH, Jampersal dan SJSN Kesehatan, serta penanganan atas kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana yang selama ini masih bersifat parsial. Hal ini untuk mendukung kegiatan Kampung KB Kelurahan Way Lunik dalam alokasi anggaran per kegiatan.

PENUTUP

SIMPULAN

SARAN

Kelembagaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik telah terinternalisasi dengan baik dengan adanya pendampingan dari PLKB. Intervensi lintas sektor dengan berbagai dukungan kegiatan berjalan dengan baik. Partispasi masyarakat sangat baik, dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan keterbatasan pada berbagai hal. Walaupun demikian pengurus Kampung KB telah melakukan berbagai strategi untuk

terus menjalankan Kampung KB agar tercapainya kesejahteraan dan pembangunan keluarga di Kelurahan Way Lunik.

Kelembagaan Kampung KB di Kelurahan Way Lunik telah terinternalisasi dengan baik dengan adanya pendampingan dari PLKB. Intervensi lintas sektor dengan berbagai dukungan kegiatan berjalan dengan baik. Partispasi masyarakat sangat baik, dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi Covid19 saat ini menyebabkan keterbatasan pada berbagai hal. Walaupun demikian pengurus Kampung KB telah melakukan berbagai strategi untuk terus menjalankan Kampung KB agar tercapainya kesejahteraan dan pembangunan keluarga di Kelurahan Way Lunik.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola Kampung KB, perlu adanya fasilitas sarana infrastruktur yang memadai seperti sekretariat sendiri bagi pengurus Kampung KB Kelurahan Penegahan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melihat persepsi pengurus Kampung KB dan warga yang terlibat saja. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengukur strategi pengelolaan Kampung KB yang melibatkan para expert.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2017). *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Direktorat Bina Lini Lapangan.
- BKKBN. (2019). *Profil Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Tahun 2019*. Direktorat Bina Lini Lapangan.
- BKKBN. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024*.
- BPS. (2020). *Provins Lampung Dalam Angka 2020*.

- Dewi, A., Fasihani, R., & Fitria, M. S. B. (2021). *Kuliah Whatsapp # BincangKB Wonogiri : Alternatif Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Masa Pandemi COVID-19*. 2(1), 28-35.
<https://doi.org/10.37269/pancanaka.v2i1.84>
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/>. (n.d.).
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Munawar, E., & Renggina, G. N. (2021). Strategi pengaktifan kelompok bina keluarga balita pada kampung keluarga berencana. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4 (1).
- Resnawaty, R., Humaedi, S., & Adiansah, W. (2021). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3 (1).
<http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/32142>
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

